



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 125 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan/atau rotasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, perlu dilakukan perubahan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 06 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd.

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
Dwi Arifianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 125 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN
EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Pita Anjarsari	Ketua	Ketua	Pengarah
2	Herdi Wijanarko	Anggota	Anggota	Pengarah
3	Fi'ikrisna Setiawan	Anggota	Anggota	Pengarah
4	Nur Imansyah	Anggota	Anggota	Pengarah
5	Rafif Ramadhan	Anggota	Anggota	Pengarah

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Retno Melya Muslim	Sekretaris	Ketua	Koordinator
----	--------------------	------------	-------	-------------

2.	Dwi Arifianto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. • Target yang ingin dicapai: <ol style="list-style-type: none"> a. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan b. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. c. Implementasi Core Value ASN Berakhlek (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif c. dan kolaboratif).
3.	Juni Nurul Imawati	Fungisional PKP Ahli Muda		
4.	Prita Liana Purdianawati	Fungsional Pranata Komputer Mahir		
4.	Joni Hermawan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
5.	Annisa Dhea Rahmatika	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
6.	Hisyam Mega Putro	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
7.	Suparmin	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
8.	Yanuarius Agry Anggianto	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		

II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Nur Widyarini Dwi Puspitasari	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2.	Eka Paramithasari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan. b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan c. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.
3.	Dodik Mustahid A.R	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		
4.	Lukmanul Khakim	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		
5.	Sabila R	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		
6.	Retno Sari Widyaningrum	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
7.	Heru Cahyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		

8.	Cristin Catur T.S	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
9.	Herry Sulistyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
10.	Dadang Purwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
11.	Gatot Sutrisno	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
12.	Agus Supriono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
13.	Supriyadi	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
14.	Radifan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
15.	Aditya Risky D.S	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Nur Hansah	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM. • Target yang ingin dicapai: <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur. c. meningkatnya profesionalisme SDM.
2.	Fitri Karinawati	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Boby Kurniawan	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
4.	Gusnizar Akbar	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Nur Widyarini Dwi Puspitasari	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. • Target yang ingin dicapai: <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kinerja KPU Kota Madiun; dan b. meningkatnya akuntabilitas KPU Kota Kota Madiun.
2.	Eka Paramithasari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Dodik Mustahid A.R	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		
4.	Lukmanul Khakim	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		
5.	Sabila R	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		

6.	Retnosari Widyaningrum	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
7.	Heru Cahyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
8.	Cristin Catur T. S	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
9.	Dadang Purwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
10.	Herry Sulistyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Dwi Arifianto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Madiun. • Target yang ingin dicapai: <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh KPU Kota Madiun. b. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada KPU Kota Madiun.
----	---------------	--	-------	--

				c. meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.
2.	Joni Hermawan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Annisa Dhea Rahmatika	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
4.	Hisyam Mega Putro	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
5.	Yanuarius Agry. A	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
6.	Suparmin	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK

1.	Nur Hansah	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada KPU Kota Madiun secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. • Target yang ingin dicapai: <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kualitas pelayanan public (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada KPU Kota Madiun; dan b. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh KPU Kota Madiun.
2.	Eka Paramithasari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Dwi Arifianto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
4.	Juni Nurul Imawati	Fungsional PKP Ahli Muda		
5.	Prita Liana Purdianawati	Fungsional Pranata Komputer Mahir		

6.	Retnosari Widyaningrum	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik			
7.	Heru Cahyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik			
8.	Cristin Catur T.S	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik			
9.	Herry Sulistyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik			
10.	Dadang Purwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik			
11.	Agus Supriono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik			

12.	Gatot Sutrisno	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
13.	Fitri Karinawati	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
14.	Boby Kurniawan	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
15.	Gusnizar Akbar	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
16.	Joni Hermawan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		

VII. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Retno Melya Muslim	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.• Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Birokrasi• Sekretariat serta melaporkan kepada tim Pengarah setiap bulan bersama tim Reformasi Birokrasi.• Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Eka Paramithasari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Nur Hansah	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
4.	Dwi Arifianto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
5.	Nurwidyarini Dwi Puspitawati	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Kepsubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Dwi Arifianto



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd.

PITA ANJARSARI